

**Evaluasi Pelaksanaan Program
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran**

¹⁾Yuyun Taufik, ²⁾Santy Sriharyati

Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I
Email: yuyuntaufik@plb.ac.id, santysriharyati@plb.ac.id

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini memfokuskan tentang evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Pangandaran, dimana pada tahun 2019 Kabupaten Pangandaran memperoleh 820 unit rumah yang diperbaiki atau 820 KK yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Populasi penelitian ini, difokuskan kepada penerima bantuan, sampel yang terpilih sebanyak 100 sampel dan stakeholder yang terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara mendalam kepada tim pelaksana kegiatan. Pada tahap pengolahan data menggunakan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukkan bahwa skor rata-rata dari evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,84 yang berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini.

Dari penelitian ini, bahwa pentingnya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Pangandaran dan menjadi perhatian penting bagi stakeholder terkait dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni serta dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kedepannya.

Kata Kunci : Badan Keswadayaan Masyarakat, Evaluasi Program, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

The Program Implementation Evaluation Of Improvement Indecent Living House For Low Income People In The Tourist Area Pangandaran

Abstract: The purpose of the research is to do the program implementation evaluation of improvement indecent living house for low income people in the tourist area Pangandaran. It focusing on the program implementation evaluation of improvement indecent living house, that was in 2019, the Pangandaran sub district received 820 houses for improvement that belong to the low income people. The research population addressed to people who had received the grant, the chosen samples were 100 and related stakeholder.

The method which is used in the research, using qualitative and quantitative descriptive method. Then, the data collecting technique through guided interview by questioner and doing comprehensive interview. They all done by team of field observer. SPSS was used for data processing step. The result of research is, the program implementation evaluation of improvement indecent living house is really helpful, clearly effective to accomplish improvement indecent living house. It shows from the average score of the implementation improvement evaluation of indecent living house is 3,84. It means in high level/agree. The local government always continues to propose this program.

Finally, from this research. It is important of the program implementation evaluation of improvement indecent living house in Pangandaran, and furthermore becoming main concern for the related stakeholder in handling the problem of indecent living house and to give the recommendation for the improvement in the future.

Key words: People empowering agent, program evaluation, low income people, improvement indecent living house.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Tanggal 17 November tahun 2012, Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan. dengan ibu kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi. Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama. Kabupaten Pangandaran merupakan kawasan wisata yang terdapat di Propinsi Jawa Barat, seyogyanya mempunyai infrastruktur yang memadai untuk menunjang kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dilaksanakan secara swakelola, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hunian yang sehat, aman dan nyaman. Salah satunya perumahan bagi MBR, pada akhirnya akan mendukung ekonomi masyarakat setempat.

Tahun 2019 Kabupaten Pangandaran memperoleh 820 unit rumah yang diperbaiki, dengan harapan kedepannya adalah rumah dengan kualitas layak huni, tertata baik, dengan dukungan prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat. Sehingga hal ini akan menunjang wisata yang lebih tinggi, tidak mustahil rumah yang diperbaiki oleh bantuan pemerintah akan dipergunakan sebagai hunian bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Pangandaran.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program perbaikan rutilahu, pihak stakeholder mengetahui bagaimana

mengidentifikasi indikator dan tolok ukur pelaksanaan program perbaikan rutilahu serta dampak positif terhadap kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran.

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi Program

Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2013) evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan. Sedangkan menurut Sudharsono (1994) penelitian evaluasi program mengandung makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif. Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pangandaran ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan (Dunn, 2013). Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Pangandaran ini dapat memberikan informasi serta rekomendasi pengembangan program ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap pengolahan data menggunakan SPSS, agar data dapat dianalisis berdasarkan kerangka teori yang menjadi acuan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Proses diawali dengan mengidentifikasi indikator dan tolok ukur yang akan dievaluasi. Identifikasi indikator dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, yang meliputi teori-teori dan peraturan perundangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Selanjutnya, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur yang telah dihasilkan, dilakukan perbandingan terhadap kondisi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pangandaran, sehingga dapat memberikan informasi serta rekomendasi pengembangan program ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data Sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan program perbaikan rumah tak layak huni.

Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Proses wawancara dilakukan kepada responden melakukan wawancara. agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka perlu disusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan hal-hal utama dalam bentuk pertanyaan yang dijadikan acuan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada responden wawancara. Alat wawancara yang dapat dipergunakan (Sugiyono, 2005) adalah buku catatan, alat perekam, serta kamera.

Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapat informasi

yang terkait dengan program perbaikan rutilahu. Penentuan responden wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Instansi yang terkait dengan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Pangandaran, dijadikan responden. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Camat, Lurah, BKM dan PB.

b. Observasi Lapangan

Menurut Nawawi (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang dilakukan berupa catatan lapangan dan foto-foto kondisi rumah-rumah dan lingkungan yang mendapatkan program perbaikan rumah tak layak huni.

c. Penyebaran Kuesioner

Pengumpulan data dari masyarakat yang mendapatkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampling berdasarkan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner di wilayah lokasi penelitian.

3. Metode Analisis

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2001). Terdapat dua metode yang digunakan dalam menganalisis data pada studi ini yaitu Deskriptif Kualitatif dan Statistik Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah fokus kepada penerima bantuan, sampel yang terpilih sebanyak 100 responden, dengan 46% responden perempuan dan 54% responden laki-laki, Dari hasil survey lapangan, status responden dalam keluarga terbesar 53% sebagai istri/suami kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga 46%, dan anggota rumah tangga lainnya sebanyak 1%. Pekerjaan dari responden sebagian besar buruh/tukang/sopir sebesar 86%, sebagai petani/nelayan sebesar 9%, sebanyak 4% lainnya dan terakhir status pekerjaan responden swasta/BUMN/BUMD sebesar 1%. Oleh karena itu dapat disimpulkan terbanyak status pekerjaan responden sebagai buruh/tukang/sopir. Orang yang tinggal dalam satu rumah sebanyak kurang dari 5 orang sebesar 95% dan 5 s/d 10 orang sebesar 5%, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 850.000/bulan, 100% kepemilikan rumah sendiri, daya listrik adalah sebesar 66% yang menggunakan 1 paket atau 450 VA, dan yang menggunakan 2 paket atau 900VA sebesar 34%. Sedangkan lama tinggal responden yang menerima bantuan Rutilahu menunjukkan bahwa 85% lebih dari 15 tahun tinggal di kabupaten Pangandaran, 12 sampai 15 tahun sebesar 6%, kurang dari 1 tahun sebesar 4%, 3 sampai 6 tahun sebesar 3%, dan sebesar 2% lama tinggal 6 sampai 9 tahun.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Evaluasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pangandaran dimana

penilaian skor merupakan sebuah acuan atau patokan agar dapat mengambil kesimpulan dengan

akurat yang didukung oleh pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, dengan rata-rata skor : 4,20 – 5,00 (sangat tinggi/sangat setuju), 3,40 – 4,19 (tinggi/setuju), 2,60 – 3,39 (cukup tinggi/cukup setuju), 1,80 – 2,59 (tidak tinggi/tidak setuju) dan 0 – 1,79 (sangat tidak tinggi/sangat tidak setuju).

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukkan bahwa skor rata-rata dari evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,84 yang berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini. Tim LPM dan Pendamping saling membantu dari awal sampai akhir oleh karena itu dari pihak desa mendukung sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan rumah dan berjalan dengan lancar. Evaluasi secara umum dari program ini sangat efektif dikarenakan kerja sama antara perangkat desa pendamping dan warganya bergotong royong dan kompak dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan untuk masyarakat dan masyarakat tidak ada yang komplain. Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari program ini.

Adapun hasil penelitian berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu : Program Perbaikan RTLH sesuai dengan tujuan program

Hasil skor dari pernyataan diatas yang telah dibagikan kepada responden adalah 4,10 yang menyatakan tinggi. Informasi tentang RTLH perlu disampaikan kepada mereka sangat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, agar mereka memahami pentingnya program Rumah Layak Huni Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sangat bermanfaat.

Kesesuaian Program Perbaikan RTLH dengan tujuan program pemerintah secara umum

Hasil skor dari pernyataan di atas yang telah dibagikan kepada responden adalah 4,08 yang menyatakan tinggi. Karena responden memahami dan mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh LPM

maupun pendamping lapangan tentang pentingnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni yang merupakan program yang selaras dengan tujuan program pemerintah secara umum.

Penerima Bantuan Tepat Sasaran

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,84 yang menyatakan tinggi. Karena LPM sering menjelaskan Program Rumah Tidak Layak Huni agar masyarakat yang rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni dan setara dengan warga sekitar serta tidak akan ada perbedaan rumah lagi. Untuk sasaran yang mendapatkan bantuan RUTILAHU karena sudah didata dan harus sesuai dengan persyaratan, sehingga sudah sesuai dengan sasaran dan rumahnya sudah di tempati oleh Penerima manfaat. Namun kalau bisa tahun depan Desa Sukajaya ingin mendapatkan bantuan lagi

Menempati Rumah Bantuan Program Perbaikan RTLH

Hasil skor dari pernyataan di atas yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,91 yang menyatakan tinggi. PB yang rumahnya sudah selesai di perbaiki melalui program Rutilahu sudah bisa menempati Rumah tersebut sehingga PB bisa lebih leluasa lagi untuk membenahi segalanya termasuk membenahi perekonomian keluarga.

BKM membantu PB dalam Kegiatan Program

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,77 yang menyatakan tinggi. Bahwa peranan BKM dalam memilah warga/masyarakat benar-benar tepat dan membantu prosesnya dalam kegiatan program supaya PB tidak salah sasaran.

Seperti yang diketahui Pemda, BKM, dan Satkholder membantu menyukseskan program RTLH dari mulai mengusulkan dan mendata merancang kembali untuk mengajukan kembali pengajuan program RTLH untuk menindak lanjuti yang mana saja yang belum dan sudah mendapatkan

bantuan perbaikan rutilahu.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari PEMDA LPM Desa dan Pendamping saling gotong royong untuk mensukseskan kegiatan RUTILAHU sampai selesai.

Untuk pihak yang dari Desa, LPM maupun pendamping saling bekerjasama oleh karena itu program RTLH bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat menerima dengan bantuan yang diberikan.

Tahun 2019 kebelakang PU mengajukan pada dinas berdasarkan data yang ada, yang telah direkap yang mana yang sudah mendapatkan dan belum, kuota berdasarkan TMP2K berkoordinasi dengan desa, tahun 2021 mengajukan atau pengusulan melalui aplikasi sirampak Sekar yang mengajukan desa dan LPM yang aktif, tahun 2021 yang mengusulkan 24 desa, yang di acc 12 desa berkurang menjadi 7 desa.

Ketepatan Mekanisme Pengajuan Bantuan

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,84 yang menyatakan tinggi. BKM sangat tepat karena melihat secara langsung/terjun langsung ke masyarakat sehingga bantuan sangat tepat sasaran.

Seperti yang diketahui Pemda, BKM, dan Satkholder mambantu menyukseskan program RTLH dari mulai mengusulkan dan mendata merancang kembali untuk mengajukan kembali pengajuan program RTLH untuk menindak lanjuti yang mana saja yang belum dan sudah mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu.

Ketepatan Mekanisme Pencairan Bantuan

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,92 yang menyatakan tinggi. Untuk proses pencairan bantuan sudah tepat sekali sehingga proses progam Rutilahu tidak tersendat/terhambat.

Karena sudah ada prosesnya untuk pengajuan serta pencairan jadi tidak ada masalah dan sudah tepat pada porsinya atau sudah tepat pada sarasannya.

Untuk Pengajuan pencairan pada Program Rutilahu yang dipegang oleh pendamping untuk proses sampai akhir dan alhamdulillah sudah sesuai porsinya

Peningkatan Fisik Perbaikan RTLH

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,75 yang menyatakan tinggi. Program ini dapat mewujudkan keinginan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni menjadi sangat layak huni sehingga masyarakat tersebut terbantu oleh adanya program ini.

Material dan bantuan yang diberikan, untuk beberapa warga membantu mencukupi dengan tambahan bantuan berupa material bahan pokok bangunan yang dialokasikan untuk membangun rumah yang

layak dihuni. Dalam hal kecukupan untuk hal fisik, ekonomi yang mungkin ada sedikit kendala karena harus swadaya kadang ada yang swadayanya kecil jadi bangunannya kecil tapi masyarakat tetap puas

Untuk kecukupan pasti cukup tetapi kalau bisa ditambah lagi agar program perbaikan ini lebih baik lagi dalam hal fisik maupun ekonomi tetapi dalam hal sosial sudah bagus dalam gotong – royongnya.

Peningkatan Ekonomi

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,60 yang menyatakan tinggi. Masyarakat yakin apabila rumah mereka telah di renovasi melalui program rumah tidak layak huni menjadi layak huni meningkatkan perekonomian keluarga mereka karena rumah mereka mungkin akan di jadikan tempat berjualan.

Peningkatan Sosial (Keswadayaan)

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,68 yang menyatakan

tinggi. Karena masyarakat mengetahui bahwa peningkatan social (keswadayaan) sangat penting karena dari program tersebut peningkatan sosial di masyarakat tersebut terjamin.

Kesesuaian Harapan

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 3,95 yang menyatakan tinggi. Program ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat karena orang yang mendapatkan bantuan dari rogram ini sangat tepat sasaran.

Manfaat Yang Dirasakan

Hasil skor dari pernyataan yang telah dibagikan kepada responden adalah 4,02 yang menyatakan tinggi. Karena masyarakat merasakan besarnya manfaat setelah rumah yang mendapatkan program ini menjadi lebih layak lagi untuk di huni. Karena sudah ada kesepakatan dari awal untuk type dan lainnya tergantung dengan swadaya secara maksimalnya, pada akhirnya sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu perangkat desa dan fasilitator hanya membantu untuk mencapai apa yang di inginkan masyarakat.

Permasalahan/Kendala Yang Terjadi

Diantara semua pertanyaan kuesioner, pertanyaan terkait permasalahan/kendala yang terjadi Hasil skornya paling kecil yaitu 3,53. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain :

- Karena Kabupaten baru jadi banyak yang harus dibangun dari infrastruktur dan peningkatan kualitas rumah warganya.
- Beberapa warga menempati beberapa tanah milik negara.
- Kurangnya pendataan terhadap CPCL
- Pada saat permintaan barang yang bersamaan yang menyebabkan barang bangunan tersendat jadi pembangunan aga terlambat
- Pengajuan pemakaian balong saat yang harus memakai kayu kelas 2 dan tidak bisa kayu kelas 3 jadinya memakai batakonya tersendat karena permintaan yang sekaligus.
- Kekurangan tukang bangunan, bentrok karena di Kecamatan Cimerak semua desanya mendapat bantuan
- Terjadi rebutan bahan material karena pembangunan dilakukan secara serentak
- Air yang jadi permasalahan pokok karena musim kemarau jadi susah jadi harus beli
- Yang membantu untuk membangun untuk bareng bareng dengan warga sekitar hanya pemasangan pondasi dan genting berbeda dengan di daerah ciamis yang bergotong royong dari awal sampai akhir.

Tabel. Rekapitulasi Skor Hasil Kuesioner

No	Variabel	Skor	Rata-rata Skor
1	Kesesuaian Program Perbaikan RTLH	4,10	
2	Program Perbaikan RTLH sesuai dengan tujuan program pemerintah	4,08	
3	Penerima Bantuan sudah tepat sasaran yaitu untuk MBR	3,84	
4	PB sudah dapat menempati rumah dari Program Perbaikan Rutilahu	3,91	
5	BKM membantu PB dalam kegiatan program	3,77	

No	Variabel	Skor	Rata-rata Skor
6	Ketepatan Mekanisme Pengajuan Bantuan	3,84	
7	Ketepatan Mekanisme Pencairan Bantuan	3,92	
8	Peningkatan fisik rumah	3,75	
9	Peningkatan ekonomi	3,60	
10	Peningkatan sosial (keswadayaan)	3,68	
11	Kesesuaian Harapan	3,94	
12	Manfaat	4,02	
13	Permasalahan/Kendala	3,53	
			3,84

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2020

□

Adapun penjelasan dari hasil penelitian adalah bahwasanya evaluasi kegiatan perbaikan rutilahu sebesar 3,84 artinya secara umum masuk dalam kategori tinggi. Dari 13 variabel diatas yang harus menjadi perhatian bagi para stakeholder yaitu pada 3 (tiga) variabel yaitu peningkatan ekonomi (3,60), peningkatan sosial (keswadayaan (3,68) dan permasalahan/kendala (3,53). Walau masuk dalam kategori baik, ketiga variabel tersebut perlu diperhatikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sangat membantu, jelas sangat efektif untuk penuntasan rumah tidak layak huni, hal ini ditunjukkan bahwa skor rata-rata dari evaluasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 3,84 yang berarti tinggi/setuju dan pemerintah daerahpun tidak lelah berhenti untuk mengusulkan program ini. Hal ini ditunjukkan bahwa skor rata-rata dari evaluasi. Berbicara keefektifan di Kabupaten Pangandaran sangat baik dan lancar karena tim LPM dan Pendamping saling membantu untuk membuat masyarakat puas dengan membantu dari awal sampai akhir oleh karena itu dari pihak desa mendukung sepenuhnya untuk kegiatan perbaikan rutilahu dan berjalan dengan lancar. Evaluasi secara umum dari program ini sangat efektif dikarenakan kerja sama antara perangkat desa pendamping dan warganya bergotong royong dan kompak dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan untuk masyarakat dan masyarakat tidak ada yang komplain. Sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari program ini.

Dari penelitian ini, bahwa pentingnya evaluasi pelaksanaan program perbaikan rutilahu di Kabupaten Pangandaran dan menjadi perhatian penting bagi stakeholder terkait dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni serta dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, 2011. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Penerbit Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

- Bramantyo. 2012. *Efektivitas Regulasi Perumahan di Indonesia dalam Mendukung Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*. Widyariset, 15(1), 243-248.
- Bambang Winarto. 2018. *Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 6 No.1 (66-74).
- Dunn, William N, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Penerbit Gadjah Mada Press.
- Herdiansyah,H. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press
- Kawer, Orthinus Ferdinando Samfar, dkk. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dengan Pendekatan Hibrida Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*. *Sosiohumaniora*, Vol.20 No.3.
- Mardikanto, T. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sagita Parnomo. 2016. *Membangun Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Asia*
- Sugiyono, T. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta